

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Oleh : ETRI CANDRA NO BP : 1320 322 028

Dibawah bimbingan : Prof. DR. dr. Rizanda Machmud. M.Kes dan
dr. H. Edison, MPH

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan KTR di Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati tentang KTR di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan desain *sequential explanatory*. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Populasi penelitian kuantitatif adalah seluruh kepala/ pimpinan instansi ditingkat kecamatan yaitu perkantoran pemerintah, tempat bermain anak-anak, sekolah negeri dan kepala puskesmas dengan besar sampel 85 responden. Teknik pengambilan sampel adalah *proportional stratified random sampling*. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan dan diskusi kelompok.

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik (84,7%), sikap responden adalah negatif (68,2%) dan tindakan responden tidak mendukung terlaksananya KTR (82,4%). Untuk penelitian kualitatif diperoleh informasi bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, belum ada tim lintas SKPD, dana bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok, sosialisasi masih kurang, tidak ada SK khusus tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, masih ditemukan unit instansi yang tidak memasang pengumuman adanya kebijakan KTR, masih ditemukan orang yang merokok di KTR, tidak ada tim pembina dan tim pengawasan lintas SKPD, KTR belum bebas asap rokok, sanksi berupa teguran lisan dan sanksi belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa belum ada tim lintas SKPD, media promosi dan sosialisasi masih kurang, KTR belum bebas asap rokok dan sanksi belum terlaksana dengan baik. Maka disarankan bagi pemerintah daerah membentuk tim lintas SKPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, memasang media promosi di setiap kecamatan, melakukan pembinaan secara terus menerus dan melakukan pengawasan secara berkala, pelimpahan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan tingkat kecamatan, penegakkan hukum yang nyata dan tegas dan meningkatkan derajat peraturan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Kawasan Tanpa Rokok.

Bahan Bacaan : 37 (1996-2014)

AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PESISIR SELATAN DISTRICT REGENT'S REGULATION ON NON SMOKING AREA

By : ETRI CANDRA REG NO : 1320 322 028

Under supervision of Prof. DR. dr. Rizanda Machmud. M.Kes and
dr. H. Edison, MPH

ABSTRACT

Indonesian law on health number 36 in 2009 mandates that local governments shall establish Non Smoking Area (NSA). Pesisir Selatan District Government sets NSA in their area through Regent's Regulation No. 45 in 2013. The purpose of this study is to analyze the implementation of the NSA regulation in Pesisir Selatan District.

This study uses mixed methods with sequential explanatory design. This study was conducted in Pesisir Selatan District on August until September 2015. The population of this quantitative research is the entire chiefs / heads of the institution in sub-district level government offices, children's playgrounds, state-owned public schools and public health centers' head with a total number is 85 respondents. The sampling technique used was proporsional stratified random sampling. Qualitative research carried out by in-depth interviews with informants and group discussion.

The results of the quantitative research shows that most respondents have good knowledge on NSA (84.7%), the negative attitude of the respondents on NSA is (68.2%) and the respondents who do not support the implementation of the NSA is (82.4%). For qualitative research the information obtained that the regulation set by the Regent of Pesisir Selatan, there is no team established across the Local Government Working Unit (LGWU), the funding comes from revenue-sharing and the tobacco excise taxes on cigarettes, socialization is still lacking, there is no decree specifically concerning the division duties and responsibilities, some units which do not put the announcements on NSA are still found, people who smoke at NSA are still found, no team builder and team supervision across the LGWU, NSA has not been free from cigarette smoke yet, the sanction is in form of oral warning and it has not been implemented well yet.

Based on the research finding, it can be concluded that there is no team across LGWU, promotion and socialization is still insufficient, NSA has not been free from cigarette smoke yet, and the sanction has not been implemented well. Therefore it is advisable for local governments to form teams across the LGWU in implementing the guidance, supervision and control, to put on the promotion media in each sub-district, to conduct training continuously and monitoring on a regular basis, to delegate the authority for guidance and supervision to the government in district level, to affirm law enforcement and to increase the degree of regulation.

Keywords : *Implementation, Regent's Regulation, Non Smoking Area.*

References : 30 (1996-2014)